

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI**

#### **2.1 Sejarah Perusahaan**

Badan Siber dan Sandi Negara berawal dari masa awal kemerdekaan Indonesia yang dimulai dari Kementerian Pertahanan yang melakukan pekerjaan di bagian pertahanan untuk mendukung pemerintahan darurat RI di Bukittinggi serta mendukung komunikasi garis depan perlawanan bersenjata hingga membantu komunikasi diplomasi Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI yang berada di New Delhi, Den Haag, dan New York (BSSN, 2023).

Pada tahun 1946 Menteri Pertahanan Amir Syarifoeudin memberi perintah kepada Roebiono Kertopati untuk membentuk Dinas Kode untuk pengamanan komunikasi melembaga yang berubah menjadi Djawatan Sandi, hal tersebut terjadi pada 4 April 1946 sehingga ditetapkan menjadi Hari Lahir Persandia Republik Indonesia.

Lalu pada tahun 1972 nama Djawatan Sandi berubah menjadi Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) dan akhirnya berubah menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



**Gambar 1.1 Logo Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)**



**Gambar 1.2 Logo Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)**

Dari awal terbentuknya Djawatan Sandi hingga berubah menjadi Badan Siber dan Sandi Negara, selalu berada di bawah pimpinan yang berasal dari TNI. Mengutip dari laman BSSN, disebutkan bahwa “Sedari Lemsaneg hingga BSSN sudah terjadi tujuh masa kepemimpinan, dimulai dari Mayor Jenderal TNI Dr. Roebiono Kertopati dari tahun 1946-1984, diikuti kepemimpinan Laksamana Muda TNI Soebardo dari tahun 1986-1998, selanjutnya oleh Laksamana Muda TNI B.O. Hutagalung dari tahun 1998-2002, lalu Mayor Jenderal TNI Nachrowi Ramli dari tahun 2002-2008, kemudian dari tahun 2009-2011 dibawah kepemimpinan Mayor Jenderal TNI Wirjono Budiharso lalu Mayor Jenderal TNI Dr. Djoko Setiadi, M.Si dan kini Badan Siber dan Sandi Negara dipimpin oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian”.

Badan Siber dan Sandi Negara memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi: Menjadi institusi tepercaya dalam menjaga keamanan Siber dan Sandi Negara dengan menyinergikan berbagai pemangku kepentingan untuk ikut serta mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Misi

1. Menjamin keamanan informasi di sektor pemerintah, infrastruktur informasi kritikal nasional, dan ekonomi digital dalam mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Membangun dan menerapkan tatakelola keamanan siber dan sandi yang komprehensif.
3. Membangun kemandirian teknologi keamanan siber dan sandi dengan mendorong tumbuhnya industri dalam negeri di bidang keamanan siber dan sandi.
4. Membangun, mengoordinasikan, mengolaborasikan, dan mengoperasionalkan sistem identifikasi, deteksi, mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan, dan pemulihan terhadap ancaman, insiden, dan/atau serangan siber dan sandi.
5. Membangun budaya keamanan siber sebagai tatanan nilai budaya yang melekat dengan mendorong tumbuhnya budaya penggunaan internet yang aman dan nyaman oleh setiap warga negara Indonesia.

6. Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya keamanan siber dan sandi melalui proses pembelajaran dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan dengan didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel.

## 2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BSSN



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Komunikasi Publik

### 1. Sekretariat Utama

Sekretariat Utama BSSN memiliki tanggung jawab kepada kepala, Sekretariat Utama memiliki tanggung jawab koordinasi pelaksanaan tugas, melakukan pembinaan, dan dukungan administrasi seluruh organisasi di BSSN. Sekretariat Utama terdiri dari Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum dan Komunikasi Publik, dan Biro Umum.

**2. Biro Perencanaan dan Keuangan**

Memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan koordinasi dan penyusunan rencana program serta anggaran, pengelolaan kinerja dan resiko, dan pengelolaan urusan keuangan.

**3. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia**

Memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, serta pembinaan dan pelaksanaan urusan sumber daya manusia.

**4. Biro Hukum dan Komunikasi Publik**

Memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, koordinasi kegiatan kerja sama di bidang keamanan siber dan sandi, pengelolaan komunikasi dan layanan informasi publik, pengelolaan naskah dinas dan kearsipan, serta pengelolaan ketatausahaan dan dukungan strategis pimpinan.

**5. Biro Umum**

Memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara, dan pengadaan barang atau jasa.

**6. Inspektorat**

Bagian ini merupakan bagian pengawas inter di lingkungan BSSN yang memiliki tugas dan tanggung jawab penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern; pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala; penyusunan laporan hasil pengawasan; pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

## **2.3 Kegiatan Umum Perusahaan**

Kegiatan umum perusahaan yang dilakukan BSSN ialah melakukan analisa dalam ruang siber Indonesia dengan membuat sebuah proyek yang bernama *Honey Net Project* yang memiliki fungsi membuat tiruan dari ruang siber Indonesia untuk mempelajari jenis – jenis serta tipe serangan siber yang berkembang untuk dipelajari yang kemudian dibuat perencanaan bagaimana untuk mencegah, melawan, hingga mengatasi ancaman serangan siber tersebut.

Selain itu BSSN juga mengamankan ruang siber Indonesia dengan membuat perangkat untuk dapat mendeteksi dan melacak ancaman serangan siber di instansi dan institusi untuk mendukung Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) atau sekarang disebut *Government Computer Security Incident Response Team* (GOV-CSIRT). BSSN juga dapat membantu dalam melakukan asesmen terkait pelatihan keamanan siber untuk Kementrian, Instansi Pusat, BUMN, dan Instansi Daerah.

### **2.3.1 Kegiatan Umum Biro Komunikasi Publik**

Biro Komunikasi Publik menjalankan beberapa kegiatan yang tujuannya mendukung kemandirian ruang siber yang sudah menjadi tujuan utama dari kampanye #JagaRuangSiber, beberapa kegiatan tersebut ialah membuat konten di media sosial untuk meraih perhatian masyarakat dengan mengikuti tren – tren yang sedang naik daun, melakukan liputan terkait kegiatan BSSN sebagai bentuk transparansi informasi, melakukan kegiatan literasi ([literasi.jagaruang Siber.id/](http://literasi.jagaruang Siber.id/)) untuk publik yang juga menjadi salah satu kegiatan kampanye, dan komunikasi publik juga mengatur kunjungan oleh badan pemerintahan pusat maupun daerah, lembaga pemerintahan lainnya untuk kunjungan kerja ataupun kunjungan kuliah praktek, dan juga dari tingkat edukasi seperti sekolah menengah kejuruan (SMK) dan universitas untuk memberikan edukasi terkait keamanan ruang siber.